

# Laporan Analisis Situasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di Nias Utara dan Nias Selatan, Sumatera Utara

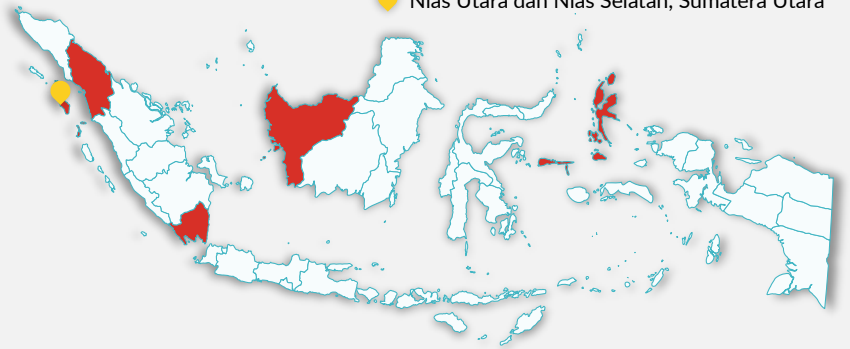
## Latar Belakang

Meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi, pendidikan karakter, serta penerapan inklusi sosial dan pendidikan perubahan iklim di sekolah merupakan langkah penting dalam membentuk masyarakat Indonesia yang cerdas, unggul, dan bertanggung jawab, sehingga mampu berkontribusi positif bagi bangsa. Upaya ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mentransformasi pendidikan dan menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik, di mana seluruh pihak—siswa, guru, orang tua, pemangku kepentingan, dan masyarakat—dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan holistik siswa.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Indonesia telah menunjuk Save the Children Indonesia dan Save the Children Australia melalui Program KREASI (Kolaborasi untuk Edukasi Anak Indonesia) yang didanai oleh Global Partnership for Education (GPE) Multiplier Grant.

Dalam rangka merancang program yang mampu secara akurat memenuhi kebutuhan lokal, diperlukan diagnosis kontekstual terkait permasalahan di setiap wilayah. KREASI bekerja sama dengan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) untuk menganalisis situasi keterampilan dasar (numerasi, literasi, dan pembentukan karakter) serta perlindungan anak, termasuk pengarusutamaan GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) dan pendidikan perubahan iklim dengan melakukan lokakarya konsultatif di delapan kabupaten di empat provinsi.

- Provinsi intervensi Program KREASI
- Nias Utara dan Nias Selatan, Sumatera Utara

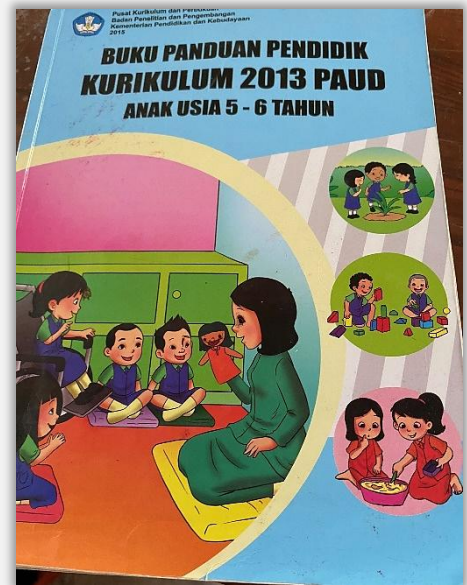


Studi kualitatif ini dilaksanakan pada Maret hingga Juli 2024, menghasilkan beragam temuan, mulai dari praktik baik hingga tantangan dalam upaya meningkatkan transformasi pembelajaran yang sejalan dengan tujuan KREASI, yaitu memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata, serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua.

## Kurikulum &amp; Asesmen

Para guru di Nias Utara dan Nias Selatan **telah menyesuaikan kurikulum dengan mengedepankan pemenuhan kebutuhan anak**, pembelajaran terdiferensiasi, dan kesetaraan dalam proses belajar. Kurikulum sekolah-sekolah di kedua kabupaten juga mencakup pendidikan karakter, isu lingkungan, dan perubahan iklim. Namun, **implementasi yang sebenarnya masih terbatas dan pemahaman terkait pembelajaran terdiferensiasi masih kurang**. Misalnya, guru cenderung menggunakan gaya belajar sebagai satu-satunya acuan dalam menerapkan terdiferensiasi, tanpa memperhatikan variasi kebutuhan lain pada siswa. Akibatnya, upaya untuk meningkatkan keterampilan literasi dan numerasi seringkali tidak maksimal dalam proses pembelajaran sehari-hari.

Guru di Nias Selatan menunjukkan **komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penerapan strategi mengajar inovatif**, termasuk penggunaan Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan perangkat teknologi seperti Chromebook. Peningkatan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengembangkan literasi digital. Di tingkat komunitas, kolaborasi dengan universitas setempat, seperti Universitas Nias Raya, mendukung pendidikan melalui program Kampus Merdeka yang melibatkan mahasiswa dalam pengajaran dan magang di sekolah dasar dan taman kanak-kanak. Lembaga lokal seperti Lembaga Ya'ahowu dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Lentera Ono Niha juga berperan dalam meningkatkan literasi melalui penyediaan buku dan pendirian perpustakaan desa.



Kendati demikian, **beberapa tantangan dalam kurikulum dan asesmen masih perlu diperhatikan**, khususnya terkait pendidikan inklusif bagi anak-anak penyandang disabilitas dan anak-anak dari latar belakang yang terpinggirkan. Program literasi di daerah ini, seperti mobil perpustakaan keliling, masih terbatas dari segi koleksi buku dan jumlah armada. Selain itu, **kurikulum belum sepenuhnya memasukkan pendidikan perubahan iklim yang lebih mendalam meskipun posisi Nias sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim**, yang mempengaruhi ekosistem dan kelangsungan hidup komunitas lokal.

Di sektor pendidikan anak usia dini (PAUD), tantangan kurikulum dan asesmen mencakup **keterbatasan dana, komitmen yang rendah, dan kurangnya pemantauan yang konsisten**. Penggunaan metode asesmen masih bergantung pada penilaian verbal yang lebih menggambarkan minat siswa daripada indikator baku. Guru PAUD sering menghadapi keterbatasan keterampilan teknologi, yang menghambat asesmen standar dan upaya untuk meningkatkan keterampilan numerasi dan literasi anak secara komprehensif. **Kurangnya panduan yang memadai juga menyebabkan pelaksanaan kurikulum tidak konsisten**, sehingga kemajuan belajar siswa tidak dapat dimonitor dengan baik.

Analisis juga menunjukkan adanya **ketidakhahaman dalam penggunaan Platform Merdeka Mengajar (PMM)**. Banyak guru beranggapan bahwa PMM hanya bisa diakses melalui komputer, sehingga mereka enggan memanfaatkannya dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Kesalahpahaman ini mengindikasikan perlunya sosialisasi dan bimbingan yang jelas mengenai pemanfaatan PMM untuk mendukung perkembangan belajar siswa.

Selain itu, terdapat **ketidaksiharian antara kebijakan regulasi dan implementasi di lapangan**. Meskipun kebijakan dan panduan mengenai kurikulum dan asesmen telah ditetapkan, implementasinya di sekolah

seringkali tidak sejalan, yang mengakibatkan kebingungan, inkonsistensi, dan inefisiensi dalam sistem pendidikan. Keselarasan antara regulasi dan praktik di lapangan perlu ditingkatkan agar hasil pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai secara efektif dan inklusif, sesuai dengan prinsip GEDSI dan kesadaran lingkungan.

## Praktik Pengajaran

Guru di Nias Utara dan Nias Selatan telah menerapkan berbagai metode pembelajaran untuk meningkatkan literasi, numerasi, dan karakter siswa. Aktivitas seperti bercerita, mendampingi anak-anak penyandang disabilitas, serta menyiapkan materi pendukung bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan siswa dan merangsang partisipasi aktif serta keterampilan motorik anak, sambil tetap menjaga kesetaraan gender dalam lingkungan belajar. Namun, tantangan masih dirasakan dalam memprioritaskan keterampilan dasar ini dan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara efektif, sehingga dukungan pelatihan yang komprehensif masih diperlukan.

Guru di Nias Selatan menunjukkan komitmen dalam meningkatkan praktik mengajar mereka melalui berbagai pelatihan dan kegiatan pengembangan profesional yang disediakan oleh Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan program dari kantor wilayah Kementerian Agama. Keterlibatan aktif dalam komunitas belajar profesional seperti Kelompok Kerja Guru (KKG) juga mendorong kolaborasi antar-guru untuk meningkatkan lingkungan belajar secara keseluruhan. Laporan rapor pendidikan terbaru menunjukkan peningkatan dalam refleksi dan pengembangan pembelajaran yang dilakukan oleh para guru.

Pendidikan perubahan iklim mulai diperkenalkan melalui aktivitas sehari-hari seperti menanam kebiasaan menjaga kebersihan, membawa botol minum sendiri, serta memilah dan mendaur ulang sampah. Beberapa sekolah bahkan menanam tanaman *Sansevieria* di halaman sekolah untuk membantu menyerap karbon dioksida. Namun, pendidikan perubahan iklim masih perlu lebih diintegrasikan dalam kurikulum agar siswa memahami dampak perubahan iklim, khususnya di wilayah Nias yang kaya akan keanekaragaman hayati dan rentan terhadap cuaca ekstrem.

Untuk menjaga kualitas pendidikan, evaluasi kinerja guru dilakukan melalui supervisi berkala. Namun, keterbatasan anggaran untuk Dinas Pendidikan menghambat pelaksanaan supervisi yang optimal, yang berdampak pada pembinaan berkelanjutan bagi guru.

Manajemen kelas yang efektif juga masih menjadi tantangan bagi para guru. Manajemen kelas yang baik sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memaksimalkan keterlibatan serta pencapaian siswa. Di Nias Selatan, tantangan utama dalam praktik mengajar disebabkan oleh kurangnya pengembangan profesional dan keterbatasan sumber daya. Banyak guru yang belum memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk memanfaatkan teknologi secara efektif dan menerapkan pengajaran inovatif untuk memberikan pengalaman belajar yang kondusif, dukungan psikologis, dan metode belajar yang memadai bagi siswa.

Guru juga menghadapi kendala dalam mengakses dan memanfaatkan PMM. Banyak guru belum menggunakan PMM karena kurangnya pemahaman dan



**enggannya menerapkan pembelajaran terdiferensiasi**, sering kali hanya menyediakan satu lembar kerja yang sama untuk semua siswa tanpa mempertimbangkan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Hal ini menyoroti perlunya bimbingan lebih lanjut dalam pemanfaatan PMM untuk mendukung perkembangan belajar siswa.

Pengembangan kapasitas guru juga membutuhkan dukungan yang lebih kuat. Peluang pengembangan profesional sangat penting agar guru dapat mengikuti praktik terbaik dalam pendidikan, meningkatkan keterampilan mengajar, dan meningkatkan hasil belajar siswa. **Area yang membutuhkan perhatian khusus adalah pendidikan inklusif dan kesetaraan gender, di mana pemahaman guru tentang keragaman dan inklusivitas masih terbatas.** Faktor geografis, **fasilitas yang kurang memadai, keterbatasan tenaga terlatih, serta keterbatasan anggaran menjadi penghambat** dalam memahami dan menerapkan program GEDSI di daerah ini.

Pendidikan perubahan iklim juga merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam kurikulum sekolah di wilayah ini, mengingat pentingnya bagi pulau Nias yang berada di Samudera Hindia dan kaya akan keanekaragaman hayati. Pulau Nias memiliki berbagai spesies hewan dan tumbuhan yang penting bagi ekosistem lokal, seperti ikan, babi, kambing, burung nuri, serta tanaman karet, kelapa, cengkeh, dan nilam. Perubahan iklim yang mempengaruhi kondisi cuaca dapat mengancam ekosistem ini dan mengganggu konektivitas antarwilayah melalui jalur udara dan laut. Oleh karena itu, **penting bagi pendidikan perubahan iklim untuk lebih diintegrasikan dalam kurikulum guna meningkatkan kesadaran siswa akan isu ini.**

### **Kepemimpinan Pendidikan**

**Kepemimpinan pendidikan di Nias Utara dan Nias Selatan telah menunjukkan beberapa praktik baik yang mendukung pengembangan karakter siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif.** Kepala sekolah, misalnya, bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mengarahkan visi dan misi sekolah yang fokus pada perkembangan holistik siswa. Dampak positif dari praktik ini terlihat dalam peningkatan hasil belajar siswa, semangat mereka untuk bersekolah, kolaborasi yang lebih baik di sekolah, serta partisipasi aktif orang tua. Kehadiran guru penggerak dan komitmen kepala sekolah dalam pengembangan diri juga menjadi kekuatan yang signifikan dalam mencapai tujuan ini.



Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam aspek kepemimpinan pendidikan yang perlu ditangani. Tantangan ini mencakup kurangnya kolaborasi antara kepala sekolah, pemahaman yang terbatas mengenai pendidikan inklusif, kesetaraan gender, dan perubahan iklim, serta perlunya memperkuat kepemimpinan instruksional di sekolah. Tanpa pemahaman yang memadai terkait GEDSI dan perubahan iklim, sulit bagi kepala sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang benar-benar inklusif dan responsif terhadap isu lingkungan.

**Kurangnya kebijakan yang spesifik untuk pengembangan kapasitas kepala sekolah di wilayah ini juga memperburuk tantangan yang ada.** Untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan sekolah, sangat penting untuk menyediakan pelatihan, sosialisasi, serta kebijakan pendukung yang menitikberatkan pada inklusivitas, kesetaraan, dan kesadaran lingkungan.

Studi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan sekolah menghadapi berbagai kendala dalam memimpin sekolah mereka secara efektif. Selain tantangan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, **kepala sekolah juga menghadapi masalah loyalitas guru, hubungan yang kurang baik dengan komite sekolah dan orang tua, serta minimnya bantuan dan supervisi dari dinas pendidikan setempat.** Hambatan ini berdampak pada kinerja kepemimpinan sekolah dan menghambat pencapaian tujuan pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

Kepemimpinan pendidikan di Nias Selatan juga dihadapkan pada **keterbatasan sumber daya, seperti anggaran yang terbatas dan kurangnya tenaga yang memenuhi syarat. Pergantian kepemimpinan yang sering dan rendahnya keterampilan teknologi** di kalangan beberapa pemimpin sekolah menambah kerumitan situasi ini. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan peningkatan kolaborasi antara pemangku kepentingan dan bimbingan yang terarah guna mengembangkan kompetensi kepemimpinan penting, khususnya dalam manajemen perubahan dan kepemimpinan instruksional yang berfokus pada siswa.

Tantangan utama lainnya yang disoroti adalah **kurangnya pemahaman terhadap konsep-konsep pendidikan utama seperti pendidikan inklusif, kesetaraan gender, dan perubahan iklim.** Kepala sekolah memerlukan penguatan dalam aspek-aspek ini agar dapat memberikan panduan yang sesuai bagi guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan sadar lingkungan.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa **kepemimpinan instruksional oleh kepala sekolah masih perlu ditingkatkan.** Beberapa kepala sekolah masih mengalami kesulitan dalam menjadwalkan rapat, mengarahkan guru, dan mengawasi program untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Selain itu, kepala sekolah belum secara konsisten menggunakan data dalam pengambilan keputusan. Faktor penghambat dalam hal ini termasuk kurangnya pelatihan kepemimpinan instruksional, rendahnya kerjasama antara guru dan kepala sekolah, serta gaya kepemimpinan yang kurang terbuka.

Selain itu, terdapat **kekurangan kebijakan khusus untuk pengembangan kapasitas kepala sekolah** di Nias Utara. Kebijakan dan panduan yang jelas untuk pengembangan profesional kepala sekolah sangat penting untuk memastikan konsistensi dan kualitas dalam praktik kepemimpinan yang mendukung pendidikan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkesetaraan.

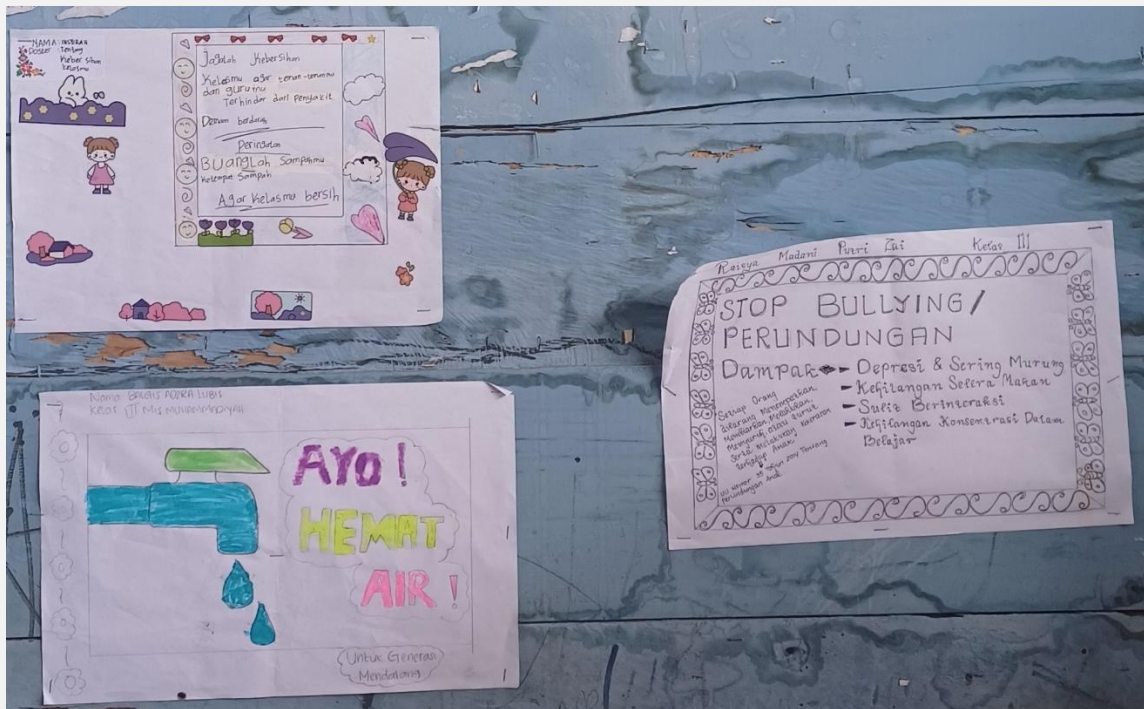
## Perlindungan Anak

Strategi penanganan kasus kekerasan seksual memerlukan dukungan yang kuat dari undang-undang dan peraturan perlindungan anak, serta pelatihan khusus bagi guru dan siswa. Namun, **tingkat kesadaran dan prioritas terhadap isu perlindungan anak masih rendah**, yang mengakibatkan risiko potensial terhadap keselamatan anak-anak. Hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat kebijakan dan regulasi dalam perlindungan anak yang lebih inklusif dan responsif.

**Praktik-praktik terbaik dalam perlindungan anak di Nias Selatan** antara lain diwujudkan melalui program kabupaten ramah anak, pembentukan komite perlindungan anak, dan kolaborasi dengan tokoh agama untuk meningkatkan keterlibatan komunitas. Pendekatan ini membantu menciptakan lingkungan yang mendukung, namun kesadaran tentang pentingnya perlindungan anak di kalangan pemangku kepentingan perlu ditingkatkan. Banyak pihak mengetahui tentang kebutuhan adanya Tim Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan (TPPK), tetapi belum memahami bahwa TPPK harus beroperasi di tingkat sekolah dan bukan di tingkat kabupaten. Kejelasan ini sangat penting agar tim dapat berfungsi efektif dalam mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan sekolah.

Masalah lain yang menjadi perhatian adalah **kurangnya fasilitas keamanan di toilet sekolah, yang menjadikannya area yang rentan terhadap tindak kekerasan**. Ini adalah masalah kritis karena sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk belajar dan berkembang. Lingkungan sekolah yang tidak aman tidak hanya membahayakan anak secara fisik tetapi juga mengganggu fokus belajar mereka. Upaya untuk memperbaiki infrastruktur ini harus menjadi prioritas bagi pembuat kebijakan dan otoritas pendidikan di wilayah ini.



Pemerintah Nias Utara dan Nias Selatan menunjukkan komitmen terhadap pendidikan dan perlindungan anak, tetapi mereka **belum memiliki regulasi khusus yang mengatur perlindungan anak secara komprehensif**. Urusan pendidikan diatur melalui kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta beberapa peraturan lainnya. Misalnya, Nias Utara memiliki peraturan daerah No. 14 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan, namun peraturan ini perlu ditinjau ulang agar relevan dengan dinamika kebijakan perlindungan anak saat ini dan mampu mengakomodasi prinsip GEDSI dalam implementasinya.

Selain itu, isu perlindungan anak memerlukan pendekatan yang lebih responsif terhadap kesetaraan gender dan inklusi sosial. Saat ini, **kesadaran tentang kebutuhan anak perempuan, anak penyandang disabilitas, dan anak-anak dari latar belakang yang terpinggirkan masih terbatas**. Tantangan-tantangan ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang tidak hanya melindungi anak-anak dari kekerasan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang benar-benar inklusif bagi semua anak, terlepas dari latar belakang mereka.

Perubahan iklim juga berdampak pada perlindungan anak, terutama di wilayah-wilayah yang rentan terhadap bencana. **Sekolah perlu dilengkapi dengan rencana tanggap darurat dan pelatihan mitigasi bencana untuk mempersiapkan siswa menghadapi kondisi cuaca ekstrem** yang dapat mengancam keselamatan mereka. Langkah ini penting agar perlindungan anak tidak hanya terbatas pada kekerasan, tetapi juga pada keamanan dalam menghadapi risiko lingkungan yang semakin meningkat.

### Kurikulum dan Asesmen:

1. **Menyediakan pengembangan profesional bagi pemangku kepentingan pendidikan terkait Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka**, termasuk pemanfaatan rapor pendidikan untuk perencanaan program dan pemantauan implementasi.
2. **Memberikan sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah**, termasuk dukungan bagi guru di daerah terpencil untuk menggunakan “Awan Penggerak”.
3. **Menunda pengajaran bahasa Inggris hingga tahun ke-3 atau fase B** untuk anak-anak yang masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa ibu, agar mereka memiliki dasar bahasa yang kuat sebelum mempelajari bahasa asing.
4. **Menyediakan pelatihan profesional bagi pemangku kepentingan utama tentang pembelajaran terdiferensiasi, pendidikan inklusif, dan pendidikan perubahan iklim** untuk implementasi yang lebih efektif.
5. **Mendukung pemerintah daerah dan legislatif untuk mengembangkan regulasi terkait implementasi pendidikan.**
6. **Membangun kemitraan dengan aktivis literasi dan universitas** untuk mengembangkan ekosistem pendidikan yang memperkuat keterampilan dasar siswa, termasuk melalui program Kampus Merdeka, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### Praktik Pengajaran:

1. **Menyediakan pengembangan profesional bagi guru terkait Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka**, termasuk pembelajaran terdiferensiasi, penggunaan PMM, dan penerapan perspektif kesetaraan gender serta pendidikan inklusif.
2. **Mendorong penggunaan “Awan Penggerak” bagi guru yang memiliki keterbatasan akses internet** dan meningkatkan supervisi serta pendampingan oleh pengawas dan kepala sekolah untuk pemanfaatan PMM.
3. **Memperkuat pengembangan profesional guru melalui komunitas belajar (KKG), PMM, dan program terkait lainnya**, termasuk pelatihan tentang pendidikan inklusif dan perspektif kesetaraan gender.
4. **Melakukan evaluasi dan asesmen kinerja guru secara sistematis dan berkesinambungan** untuk meningkatkan kualitas pengajaran.
5. **Mengembangkan materi pembelajaran terkait perubahan iklim yang sesuai dengan tingkat pendidikan** dan menyediakan fasilitas serta infrastruktur yang memadai untuk pendidikan perubahan iklim.

### Kepemimpinan Pendidikan:

1. **Mendorong Bappeda memimpin refleksi program pendidikan dengan pemangku kepentingan** dan mengembangkan perencanaan bersama berbasis data yang sesuai dengan kondisi lokal.
2. **Menyediakan pengembangan profesional bagi pemerintah dan kepala sekolah** dalam berbagai aspek kepemimpinan, termasuk pendidikan inklusif dan kesetaraan gender.

3. **Memperkuat mekanisme seleksi dan penempatan kepala sekolah** serta mengembangkan metode evaluasi kinerja kepala sekolah dan guru yang lebih efektif.
4. **Membangun budaya kolaborasi dan komunikasi terbuka antara kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua.**
5. **Menyediakan infrastruktur dan media pembelajaran yang sesuai untuk anak berkebutuhan khusus** dan membangun jaringan atau kemitraan sekolah dalam menangani dan melayani anak berkebutuhan khusus.
6. **Meningkatkan kolaborasi dengan organisasi berbasis komunitas** yang peduli terhadap pendidikan perubahan iklim, GEDSI, dan pendidikan secara umum.

### Perlindungan Anak:

1. **Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang perlindungan anak kepada seluruh pemangku kepentingan** dan mengembangkan SOP manajemen kasus yang didukung oleh kinerja optimal dari TPPK.
2. **Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, guru, LSM, dan komite sekolah dalam perlindungan anak** dan menyediakan sumber daya manusia serta pembentukan TPPK yang memadai.